

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi dan analisis yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa butir pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembangan kapasitas individu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Maluku Barat Daya seperti Pendidikan atau pengetahuan setiap pegawai, atau kompetensi pegawai dalam mengembangkan kinerja pelayanan, dan penerapan etika pelayanan dalam melayani masyarakat. seiring berjalannya waktu semua ini telah berjalan dengan efisien dan efektif.

2. Pengembangan kapasitas organisasi seperti pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, bimtek-bimtek dan diklat-diklat. Semuanya telah dilakukan untuk memperlancar kinerja pelayanan administrasi kependudukan.

3. Pengembangan kapasitas sistem seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukung pelayanan yang mengatur tentang pelayanan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah ditetapkan dan dijalankan dengan baik.

B. Saran

1. Disarankan kepada para pegawai di Dispenduk agar lebih giat lagi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat serta etika lebih diutamakan lagi agar masyarakat lebih nyaman dalam mengurus administrasi kependudukan.

2. Disarankan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk selalu mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan, bimtek-bimtek dan diklat-diklat kepada pegawai Dispenduk demi memperlancar kinerja pelayanan administrasi kependudukan.

3. Disarankan kepada masyarakat agar dalam mengurus administrasi di Dispenduk agar selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan demi memperlancar kinerja pelayanan administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anni Milen, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta, 2004, hlm. 12.
- Anni Milen, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta, 2004, hlm. 15.
- Batinggi, Achmad and Ahmad, Badu (2014) *Manajemen Pelayanan Umum*. In: Pengertian Pelayanan Umum dan Sistem Manajemen. Universitas Terbuka, Jakarta, pp. 1-32. ISBN 789790112742
- Dwiyanto Agus (editor), 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- H.A.S Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Imam Hardjanto, *Pembangunan Kapasitas Lokal (Local Capacity Building)*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm 8.
- Imam Hardjanto, *Pembangunan Kapasitas Lokal (Local Capacity Building)*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm 28.
- Prof. Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS, 2010, *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, Word bank
- Richard M, Steers, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 55
- Soeprapto Riyadi, “*Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*”,
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (cetakan ke-19). Bandung: Penerbit Alfabeta hlm. 218-219
- Tarance Morrison, *Actionable Learning – A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*, ADB Institute, 2001, hlm. 23
- Tim Peneliti, *Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*,
- Yeremias. T. Keban. “*Good Governance*” dan “*Capacity Building*” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Jakarta, 2000, hlm. 7

Jurnal

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume IV (1), FIA UNIBRAW, Malang. 2006, hlm. 20

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol . 2, No. 4, Hal. 634-640| 634

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3, h. 103-110 | 103 Thn 2013

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol . 2, No. 4, Hal. 634-640| 635 Thn 2013

Dina Nurwira Endarsari, Ida Hayu Dwimawanti, Dewi Rostyaningsih (2013).
Jurnal administrasi publik. Analisis Pengembangan kapasitas (Capacity Building)
Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal, Universitas Diponegoro, Semarang. Halm 1.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik